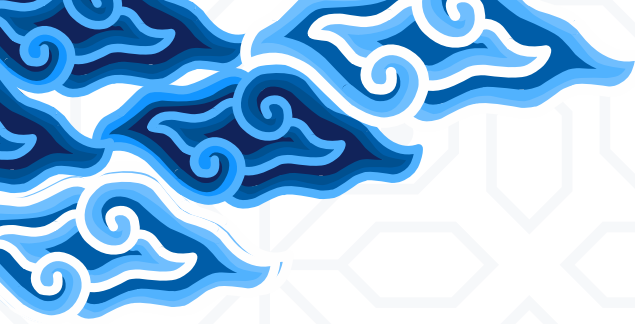




disdukcapil
Jabar

LAPORAN KEUANGAN

2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
JAWA BARAT
(AUDITED)



Jalan Ciumbuleuit No. 2 BANDUNG – 40132
(022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
<http://disdukcapil.jabarprov.go.id>,
dukcapil@jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2024 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 ini masih belum

sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 26 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Lampiran.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vi
Ringkasan	vii
Laporan Realisasi Anggaran.....	vii
Neraca	viii
Laporan Operasional.....	viii
Laporan Perubahan Ekuitas	ix
Catatan atas Laporan Keuangan.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ...	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Strategis	6
2.3 Kebijakan Keuangan.....	8
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	10
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD	10
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1 Entitas Akuntansi	13
4.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15

4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....	26
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	27
5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	27
5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	27
5.1.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	28
5.1.3	Catatan Penting Lainnya	38
5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	39
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	39
5.2.2	Penjelasan per Pos Neraca	39
5.2.3	Catatan Penting Lainnya	45
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	46
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	46
5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional.....	46
5.3.3	Catatan Penting Lainnya	49
5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	50
5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
5.4.3	Catatan Penting Lainnya	53
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN PD	54
BAB VII	PENUTUP	56
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rincian LRA
Lampiran	4	Daftar Persediaan
Lampiran	5	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran	6	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	7	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	14	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Lampiran	15	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	16	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Penyisihan dan Beban Penyusutan
Lampiran	17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 26 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

(Dalam Rupiah)						
Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 31 Dec 2024 (Audited)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 31 Dec 2023 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3 *100	7
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja					
5.1	Belanja Operasi	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00	(612.692.675,00)	96,02	13.450.792.240,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00	(402.065.290,00)	95,90	8.561.074.465,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.576.239.802,00	5.365.612.417,00	(210.627.385,00)	96,22	4.889.717.775,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	(80.044.085,00)	94,30	288.839.660,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	(80.044.085,00)	94,30	288.839.660,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Belanja	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00	(692.736.760,00)	95,87	13.739.631.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	-16.784.375.039,00	-16.091.638.279,00	692.736.760,00		-13.739.631.900,00
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-16.784.375.039,00	-16.091.638.279,00	692.736.760,00		-13.739.631.900,00

Bandung, 26 Mei 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

							(Dalam Rupiah)
NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)	TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)	
	2	3	4	5	6=(4-5)	7= (4/5)x100%	
I	KEGIATAN OPERASIONAL						
I.1	PENDAPATAN	5.4.2.1					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.2.1.1					
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.2.1.1.1	0	0	0	0,00	
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.2.1.1.2	0	0	0	0,00	
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	5.4.2.1.1.3	0	0	0	0,00	
	Lain-lain PAD Yang sah	5.4.2.1.1.4	0	0	0	0,00	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0	0	0	0,00	
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2.1.2					
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.2.1.2.1					
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1.2.1.1	0	0	0	0,00	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.1.2.1.2	0	0	0	0,00	
	Dana Alokasi Umum	5.4.2.1.2.1.3	0	0	0	0,00	
	Dana Alokasi Khusus	5.4.2.1.2.1.4	0	0	0	0,00	
	Dana Penyesuaian	5.4.2.1.2.2.2	0	0	0	0,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0	0	0	0,00	
I.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.2.1.2.2					
	Bantuan keuangan	5.4.2.1.2.2.1	0	0	0	0,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0	0	0	0,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer		0	0	0	0,00	
I.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.2.1.3					
	Pendapatan hibah	5.4.2.1.3.1	0	0	0	0,00	
	Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.3.2	0	0	0	0,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		0	0	0	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0	0,00	
II	BEBAN						
II.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.2					
	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	9.401.713.862	8.558.653.033	843.060.829	9,85	
	Beban Persediaan	5.4.2.2.2	455.289.469	473.132.707	-17.843.238	-3,77	
	Beban Jasa	5.4.2.2.3	1.972.966.631	1.782.894.069	190.072.562	10,66	
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	239.174.190	232.953.478	6.220.712	2,67	
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	2.693.823.838	2.394.723.118	299.100.720	12,49	
	Beban Bunga	5.4.2.2.6	0	0	0	0,00	
	Beban Subsidi	5.4.2.2.7	0	0	0	0,00	
	Beban Hibah	5.4.2.2.8	0	0	0	0,00	
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9	0	0	0	0,00	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.10	518.468.809	623.769.135	-105.300.326	-16,88	
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.11	0	0	0	0,00	
	Beban Transfer	5.4.2.2.12	0	0	0	0,00	
	Beban Lain-lain	5.4.2.2.13	2.255.000	0	2.255.000	0,00	
	Jumlah Beban Operasi		15.283.691.799	14.066.125.540	1.217.566.259	8,66	
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.2.3	-15.283.691.799	-14.066.125.540	-1.217.566.259	8,66	
II.2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4					
	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.4.1					
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			0	0	0,00	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			0	0	0,00	
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	0	0,00	
	Jumlah Surplus Non Operasional		0	0	0	0,00	
II.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.4.2					
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar			0	0	0,00	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			0	0	0,00	
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	0	0,00	
	Jumlah Defisit Non Operasional		0	0	0	0,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0	0	0,00	
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.5	-15.283.691.799	-14.066.125.540	-1.217.566.259	8,66	
III	POS LUAR BIASA	5.4.2.6					
III.1	PENDAPATAN LUAR BIASA						
	Pendapatan Luar Biasa		0	0	0	0,00	
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0	0	0,00	
III.2	BEBAN LUAR BIASA						
	Beban Luar Biasa		0	0	0	0,00	
	Jumlah Beban Luar Biasa		0	0	0	0,00	
	POS LUAR BIASA		0	0	0	0,00	
IV	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.2.7	-15.283.691.799	-14.066.125.540	-1.217.566.259	8,66	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 26 Mei 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

No	Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan		0	0
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0
	Kas di BLUD		0	0
	Kas BOS		0	0
1.1.3	Piutang Pajak Daerah		0	0
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah		0	0
1.1.5	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang S		0	0
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0	0
1.1.9	Bagian Lancar Piutang Sewa		0	0
1.1.10	Piutang Lain-lain		0	0
1.1.11	Penyisihan Piutang		0	0
	Penyisihan Piutang BLUD		0	0
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka		0	0
1.1.13	Persediaan		16.853.850	12.849.600
	Jumlah Aset Lancar		16.853.850	12.849.600
1.2	ASET TETAP			
1.2.1	Tanah		5.138.640.000	5.138.640.000
1.2.2	Peralatan dan Mesin		9.327.823.834	7.973.956.834
1.2.3	Gedung dan Bangunan		5.354.291.538	5.354.291.538
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		67.202.000	67.202.000
1.2.5	Aset Tetap Lainnya		0	0
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		0	0
1.2.7	Akumulasi Penyusutan		-12.555.672.605	-12.037.203.796
	Jumlah Aset Tetap		7.332.284.767	6.496.886.576
1.3	ASET LAINNYA			
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang		0	0
1.3.2	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran		0	0
1.3.3	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0	0
1.3.4	Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa		0	0
1.3.5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0	0
1.3.6	Aset Tidak Berwujud		0	0
1.3.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0	0
1.3.8	Aset Lain-lain		0	0
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		0	0
	Jumlah Aset Lainnya		0	0
	JUMLAH ASET		7.349.138.617	6.509.736.176
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0	0
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka		0	0
2.1.3	Utang Belanja		7.723.742	8.077.781
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya		0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.723.742	8.077.781
	JUMLAH KEWAJIBAN		7.723.742	8.077.781
3	EKUITAS		7.341.414.875	6.501.658.395
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.349.138.617	6.509.736.176

Bandung, 26 Mei 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


 dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
 NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

URAIAN	AUDITED 2024	AUDITED 2023
EKUITAS AWAL	6.501.658.395	6.812.215.287
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-15.283.691.799	-14.066.125.540
RK PPKD	16.091.638.279	13.739.631.900
RK SKPD	0	0
RA PPKD (Nilai Perolehan)	31.810.000	0
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0	0
RA SKPD (Nilai Perolehan)	0	0
RA SKPD (Akumulasi Penyusutan)	0	0
EKUITAS	0	15.936.748
KOREKSI SALDO AWAL KAS	0	0
KAS LAINNYA (BLUD)	0	0
KOREKSI SETORAN KAS DI BENDAHARA PENERIMA	0	0
KOREKSI SETORAN KAS DI BP TAHUN LALU	0	0
KOREKSI PIUTANG	0	0
KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	0	0
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	-960.000
KOREKSI INVESTASI PERMANEN	0	0
KOREKSI KEMITRAAN PIHAK KETIGA	0	0
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG SEWA	0	0
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TPA	0	0
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TGR	0	0
EKUITAS - KOREKSI KDP	0	0
EKUITAS - KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0	0
KOREKSI PENCATATAN PENYERTAAN MODAL DAE	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP	0	0
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	0	19.318.180
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
KOREKSI NILAI ASET TAK BERWUJUD	0	0
KOREKSI NILAI ASET LAIN-LAIN	0	0
KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
KOREKSI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	0	0
KOREKSI KEWAJIBAN	0	0
KOREKSI UTANG BELANJA	0	-2.421.432
EKUITAS - PENGESAHAN PENDAPATAN BOS	0	0
KOREKSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
KOREKSI BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0	0
KOREKSI KAS BLUD	0	0
LAIN - LAIN	0	0
PEMBAYARAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TGR	0	0
PEMBAYARAN PIUTANG LAIN-LAIN	0	0
EKUITAS AKHIR	7.341.414.875	6.501.658.395

Bandung, 26 Mei 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 Audited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp16.091.638.279,00 atau mencapai 95,87 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp16.784.375.039,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp14.767.326.279,00 atau 96,02 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp1.324.312.000,00 atau 94,30 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Belanja sebesar Rp16.091.638.279,00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar -Rp16.091.638.279,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)		Tahun Anggaran 2023 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00	14.951.609.670,00	13.739.631.900,00
Belanja Operasi	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00	14.642.948.991,00	13.450.792.240,00
Belanja Pegawai	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00	9.629.069.298,00	8.561.074.465,00
Belanja Barang dan Jasa	5.576.239.802,00	5.365.612.417,00	5.013.879.693,00	4.889.717.775,00

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)		Tahun Anggaran 2023 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Modal	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	308.660.679,00	288.839.660,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	304.123.179,00	288.839.660,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	4.537.500,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LRA	-16.784.375.039,00	-16.091.638.279,00	-14.951.609.670,00	-13.739.631.900,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.349.138.617,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp16.853.850,00 , Aset Tetap sebesar Rp7.332.284.767,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.723.742,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.341.414.875,00 .

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Lancar	16.853.850,00	12.849.600,00
Aset Tetap	7.332.284.767,00	6.496.886.576,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset	7.349.138.617,00	6.509.736.176,00
Kewajiban Jangka Pendek	7.723.742,00	8.077.781,00
Jumlah Kewajiban	7.723.742,00	8.077.781,00
Ekuitas	7.341.414.875,00	6.501.658.395,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.349.138.617,00	6.509.736.176,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya dalam Tahun Anggaran 2024. Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.283.691.799,00 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00 .

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Beban	15.283.691.799,00	14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-15.283.691.799,00	-15.283.691.799,00
Surplus/(Defisit)-LO	-15.283.691.799,00	-14.066.125.540,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.501.658.395,00 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00 , RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.091.638.279,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.810.000,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 , Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 , dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.341.414.875,00 .

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Ekuitas Awal	6.501.658.395,00	6.812.215.287,00
Surplus/(Defisit)-LO	-15.283.691.799,00	-14.066.125.540,00
RK PPKD	16.091.638.279,00	13.739.631.900,00
RA PPKD (Perolehan)	31.810.000,00	0,00
RA PPKD (Penyusutan)	0,00	0,00
Ekuitas	0,00	15.936.748,00
Ekuitas Akhir	7.341.414.875,00	6.501.658.395,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telepon (022) 2031044-2031045 Fax. 2031024 Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@Jabarprov.go.id Bandung – 40132.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Strategis

2.3 Kebijakan Keuangan

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi

4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.3.3 Catatan Penting Lainnya

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.4 Penjelasan Umum Neraca

5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca

5.3.6 Catatan Penting Lainnya

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

5.3.3 Catatan Penting Lainnya

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6
2	Program Pendaftaran Penduduk	2
3	Program Pencatatan Sipil	1
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1
JUMLAH		12

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara

pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Visi

Visi Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Misi

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Visi dan Misi diatas diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Meningkatkan Penataan Data Kependudukan;
2. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan;
3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset;

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

2.5 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat

Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2024 :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran IKU	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	82.30

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2024, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.091.638.279,00 atau 95,87 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp16.784.375.039,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp14.767.326.279,00 atau 96,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp15.380.018.954,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp9.401.713.862,00 atau 95,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.803.779.152,00 ;
 2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp5.365.612.417,00 atau 96,22 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.576.239.802,00 ;
- b. Belanja Modal sebesar Rp1.324.312.000,00 atau 94,30 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.404.356.085,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.324.312.000,00 atau 94,30 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.404.356.085,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$	6
1	Belanja Operasi	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00	96,02	13.450.792.240,00
	- Belanja Pegawai	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00	95,90	8.561.074.465,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
	- Belanja Barang & jasa	5.576.239.802,00	5.365.612.417,00	96,22	4.889.717.775,00
2	Belanja Modal	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	94,30	288.839.660,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	94,30	288.839.660,00
	Jumlah	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00	95,87	13.739.631.900,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp2.352.006.379,00 atau 17,12 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2024 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Pegawai dikarenakan ada Jabatan yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.
2. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Barang & Jasa dan hasil Negosiasi dengan Penyedia dan sisa belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
3. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta hasil Negosiasi dengan Penyedia.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2024 dihasilkan dari Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar -Rp16.091.638.279,00.

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp15.283.691.799,00 . Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Beban Pegawai	9.401.713.862,00	8.558.653.033,00
Beban Persediaan	455.289.469,00	473.132.707,00
Beban Jasa	1.972.966.631,00	1.782.894.069,00
Beban Pemeliharaan	239.174.190,00	232.953.478,00
Beban Perjalanan Dinas	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	518.468.809,00	623.769.135,00
Beban Lain-lain	2.255.000,00	0,00
Jumlah	15.283.691.799,00	14.066.125.540,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2024, entitas akuntansi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker
1	Kepala Dinas	-
2	Sekretariat	1 Subbag
3	Bidang Fasilitas Kependudukan (FPAK)	-
4	Bidang Pengelolaan Kependudukan (PIAK)	-
Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker		1 Subbag

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
2	Pengurus Barang	1 Orang
3	Pengurus Barang Pembantu	2 Orang
Total		4 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke

kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;

- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau

entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

2. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

3. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,

sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) **Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) **Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) **Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa**

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan

(KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam **Aset Lain-lain**. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai **Kewajiban Jangka Panjang** jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp16.091.638.279,00 atau 95,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16.784.375.039,00 . Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp14.767.326.279,00 Belanja Modal sebesar Rp1.324.312.000,00 ,

Belanja Operasi sebesar Rp14.767.326.279,00 atau 96,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp15.380.018.954,00 , terdiri dari:

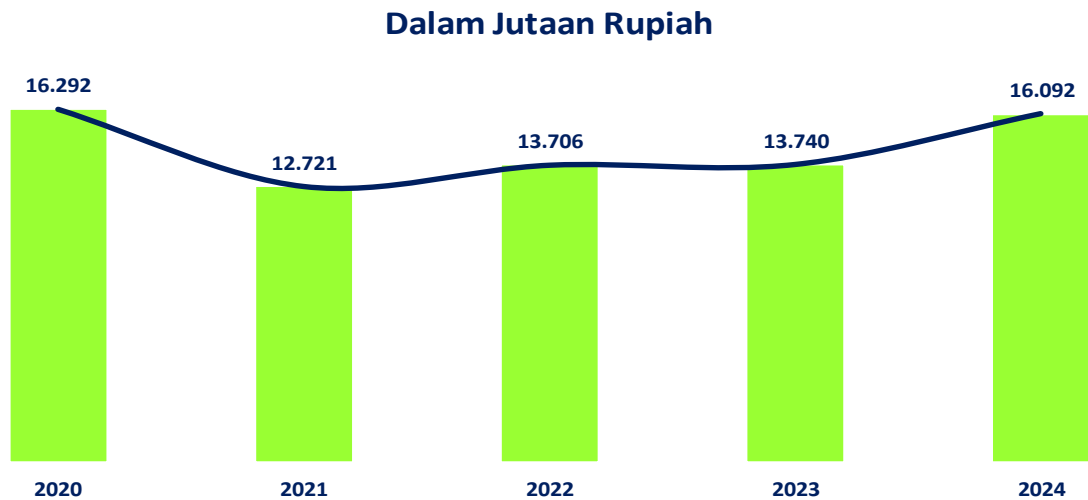
- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp9.401.713.862,00 atau 95,90 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.803.779.152,00 ;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.365.612.417,00 atau 96,22 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.576.239.802,00 ;

Belanja Modal sebesar Rp1.324.312.000,00 atau 94,30 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.404.356.085,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.324.312.000,00 atau 94,30 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.404.356.085,00 ;

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2020 s.d 2024



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan realisasi Belanja sebesar Rp16.091.638.279,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-LRA sebesar -Rp16.091.638.279,00.

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp16.091.638.279,00 atau 95,87 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp16.784.375.039,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 95,87 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Pegawai dikarenakan ada Jabatan yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.
2. Terdapat sisa anggaran dari adanya anggaran bersifat penyediaan, sisa hasil belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan hasil Negosiasi dengan Penyedia serta sisa belanja perjalanan dinas.
3. Terdapat sisa anggaran dari belanja modal disebabkan adanya sisa hasil Negosiasi dengan Penyedia.

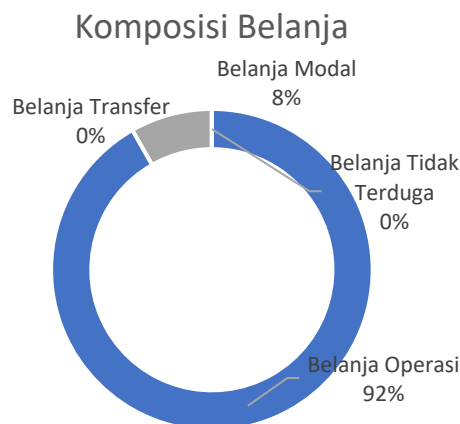
Realisasi Belanja sebesar Rp16.091.638.279,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp14.767.326.279,00 , Belanja Modal sebesar Rp1.324.312.000,00 ,. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 , berarti realisasi Belanja meningkat sebesar Rp2.352.006.379,00 atau 17,12 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2024 meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Meningkatnya realisasi anggaran pada belanja pegawai disebabkan peningkatan nilai belanja untuk tunjangan hari raya dan gaji ke 13 .
2. Meningkatnya realisasi anggaran pada belanja barang dan jasa disebabkan peningkatan nilai belanja operasi untuk menunjang kebutuhan operasional dinas
3. Meningkatnya realisasi anggaran pada belanja modal disebabkan peningkatan nilai belanja peralatan dan mesin untuk menunjang kebutuhan dan keperluan dinas.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja Operasi yaitu sebesar Rp14.767.326.279,00 atau 92 persen dari Total Belanja.

5.1.2.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp14.767.326.279,00 atau 96,02 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp15.380.018.954,00 . Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp9.401.713.862,00 , Belanja Barang dan jasa sebesar Rp5.365.612.417,00 ,.

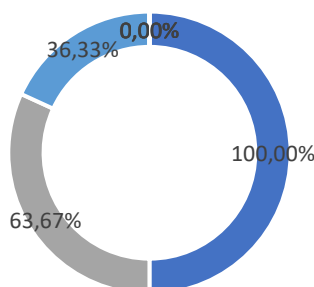
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.450.792.240,00 , berarti realisasi Belanja Operasi mengalami perubahan sebesar Rp1.316.534.039,00 atau 9,79 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi

Tahun Anggaran 2024

Komposisi Belanja Operasi



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar 63,67 persen dari Total Belanja Operasi.

5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.401.713.862,00 atau 95,90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.803.779.152,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Pegawai dikarenakan ada Jabatan yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.788.391,00	2.541.896.224,00	94,64
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.925.701.400,00	1.823.426.300,00	94,69
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	172.819.446,00	166.734.912,00	96,48
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	106.840.000,00	105.980.000,00	99,20
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	66.120.000,00	62.540.000,00	94,59
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.630.000,00	60.735.000,00	92,54
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	105.090.480,00	102.546.720,00	97,58
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.539.549,00	5.150.324,00	92,97
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.421,00	24.578,00	83,54
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	209.905.508,00	200.157.440,00	95,36
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.046.245,00	3.650.238,00	90,21
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.827.490,00	10.950.712,00	92,59
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.238.852,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.771.961.269,00	6.535.910.689,00	96,51
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.660.250.121,00	6.432.656.689,00	96,58
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	111.711.148,00	103.254.000,00	92,43
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	346.029.492,00	323.906.949,00	93,61
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	318.588.606,00	304.030.110,00	95,43
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	27.440.886,00	19.876.839,00	72,44
Jumlah		9.803.779.152,00	9.401.713.862,00	95,90

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.561.074.465,00 , berarti realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp840.639.397,00 atau 9,82 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 meningkat sebesar 9,82 persen disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat peningkatan belanja untuk tunjangan hari raya dan gaji ke 13.

2. Bertambahnya jumlah pegawai adanya mutasi masuk dan peningkatan tunjangan pegawai dari kenaikan grade jabatan.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.896.224,00	2.443.114.157,00	4,04
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.823.426.300,00	1.781.780.600,00	2,34
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	166.734.912,00	159.570.606,00	4,49
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.980.000,00	83.370.000,00	27,12
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62.540.000,00	12.310.000,00	408,04
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.735.000,00	74.135.000,00	-18,08
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	102.546.720,00	104.864.160,00	-2,21
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.150.324,00	1.909.261,00	169,75
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.578,00	29.325,00	-16,19
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	200.157.440,00	210.563.432,00	-4,94
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.650.238,00	3.645.441,00	0,13
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.950.712,00	10.936.332,00	0,13
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.535.910.689,00	5.823.218.576,00	12,24
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.432.656.689,00	5.774.738.576,00	11,39
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	103.254.000,00	48.480.000,00	112,98
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	323.906.949,00	294.741.732,00	9,90
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	304.030.110,00	294.741.732,00	3,15
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.876.839,00	0,00	0,00
Jumlah		9.401.713.862,00	8.561.074.465,00	9,82

5.1.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.365.612.417,00 atau 96,22 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.576.239.802,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Barang & Jasa dan hasil Negosiasi dengan Penyedia

dan sisa belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	507.356.227,00	459.293.719,00	90,53
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	507.356.227,00	459.293.719,00	90,53
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.016.755.739,00	1.973.320.670,00	97,85
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.932.395.923,00	1.890.700.854,00	97,84
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.209.816,00	47.209.816,00	100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	23.150.000,00	21.830.000,00	94,30
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.000.000,00	13.580.000,00	97,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	261.614.000,00	239.174.190,00	91,42
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	251.614.000,00	239.174.190,00	95,06
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.790.513.836,00	2.693.823.838,00	96,54
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.790.513.836,00	2.693.823.838,00	96,54
Jumlah		5.576.239.802,00	5.365.612.417,00	96,22

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.889.717.775,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa meningkat sebesar Rp475.894.642,00 atau 9,73 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Meningkatnya kebutuhan belanja barang dan jasa serta pemeliharaan untuk keperluan dinas.
2. Meningkatnya keperluan belanja perjalanan dinas dalam menghadapi adanya pilkada serentak.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01	Belanja Barang	459.293.719,00	481.560.612,00	-4,62
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	459.293.719,00	481.560.612,00	-4,62
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.973.320.670,00	1.780.480.567,00	10,83
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.890.700.854,00	1.702.470.387,00	11,06
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.209.816,00	50.527.680,00	-6,57
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.830.000,00	6.682.500,00	226,67
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.580.000,00	20.800.000,00	-34,71
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	239.174.190,00	232.953.478,00	2,67
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239.174.190,00	207.234.288,00	15,41
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00	12,49
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00	12,49
Jumlah		5.365.612.417,00	4.889.717.775,00	9,73

5.1.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.324.312.000,00 atau 94,30 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.404.356.085,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta hasil Negosiasi dengan Penyedia.

Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.324.312.000,00 .

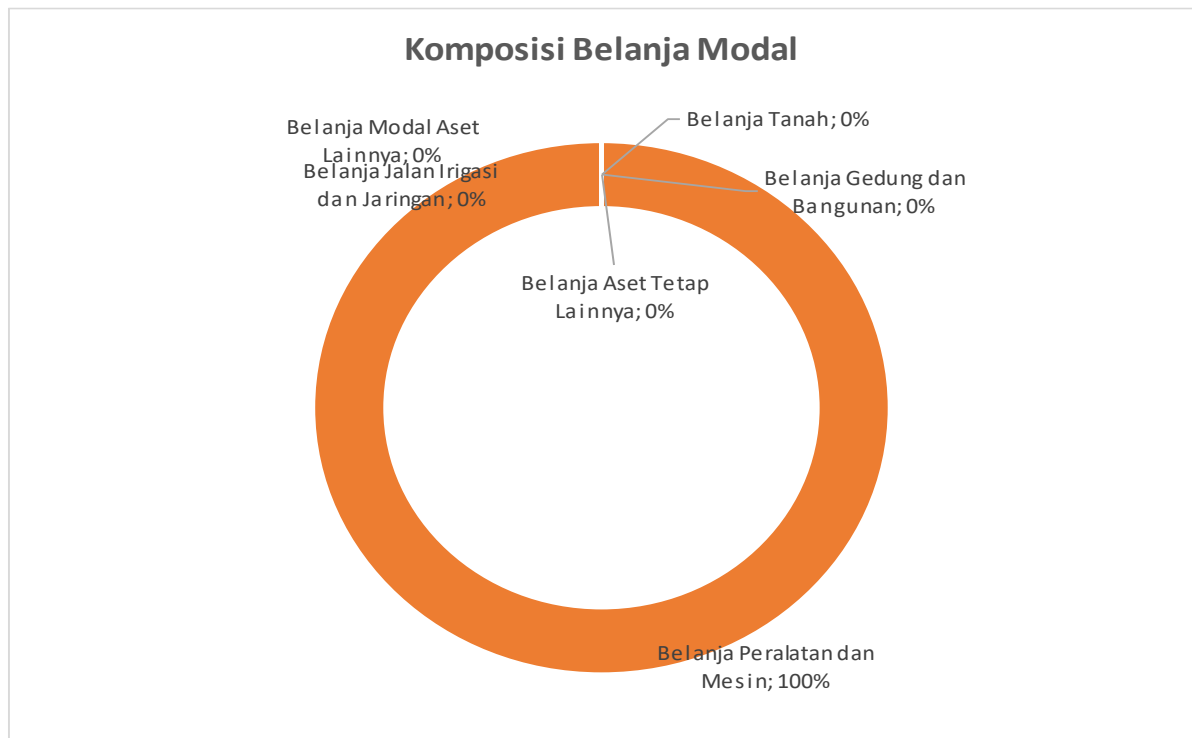
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp288.839.660,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp1.035.472.340,00 atau 358,49 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 meningkat disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Meningkatnya anggaran pada belanja modal disebabkan peningkatan nilai belanja peralatan dan mesin untuk menunjang kebutuhan dan keperluan dinas.
2. Adanya perubahan anggaran dari revitalisasi gedung dan bangunan menjadi belanja peralatan dan mesin.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 100 persen dari Total Belanja Modal.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.324.312.000,00 atau 94,30 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.404.356.085,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta hasil Negosiasi dengan Penyedia.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.119.600,00	6.592.000,00	92,59
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.119.600,00	6.592.000,00	92,59
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.404.750,00	8.600.000,00	75,41
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	11.404.750,00	8.600.000,00	75,41
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.100.000,00	2.070.000,00	98,57
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.100.000,00	2.070.000,00	98,57
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	370.852.285,00	334.001.000,00	90,06
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	143.187.620,00	131.100.000,00	91,56
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	209.090.165,00	184.341.000,00	88,16
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.574.500,00	18.560.000,00	99,92
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	235.942.250,00	227.149.000,00	96,27
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	73.805.150,00	70.100.000,00	94,98
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	162.137.100,00	157.049.000,00	96,86
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	776.937.200,00	745.900.000,00	96,01
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	448.166.500,00	433.600.000,00	96,75
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	328.770.700,00	312.300.000,00	94,99
Jumlah		1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	94,30

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp288.839.660,00 , berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp1.035.472.340,00 atau 358,49 persen dibanding Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya anggaran pada belanja modal disebabkan peningkatan nilai belanja peralatan dan mesin untuk menunjang kebutuhan dan keperluan dinas.
2. Adanya perubahan anggaran dari revitalisasi gedung dan bangunan menjadi belanja.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	$5 = \frac{(3-4)}{4} \times 100\%$
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.592.000,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.592.000,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.600.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.600.000,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.070.000,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.070.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	334.001.000,00	49.528.200,00	574,37
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	131.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	184.341.000,00	49.528.200,00	272,19
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.560.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	227.149.000,00	24.670.760,00	820,72
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	70.100.000,00	13.670.760,00	412,77
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	157.049.000,00	11.000.000,00	1.327,72
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	745.900.000,00	214.640.700,00	247,51
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	433.600.000,00	152.292.000,00	184,72
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	312.300.000,00	62.348.700,00	400,89
Jumlah		1.324.312.000,00	288.839.660,00	358,49

5.1.2.2.2.5 Surplus/(Defisi) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar -Rp16.091.638.279,00, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Belanja - LRA	16.091.638.279,00	13.739.631.900,00
Surplus/ (Defisit) – LRA	-16.091.638.279,00	-13.739.631.900,00

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar -Rp692.736.760,00. Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Penghematan Belanja	-692.736.760,00	-1.211.977.770,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-692.736.760,00	-1.211.977.770,00

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar -Rp16.091.638.279,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan Surplus / Defisit–LRA sebesar -Rp16.091.638.279,00, Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar -Rp16.091.638.279,00 , dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Belanja - LRA	16.091.638.279,00	13.739.631.900,00
Surplus / (Defisit) – LRA	-16.091.638.279,00	-13.739.631.900,00
SILPA	-16.091.638.279,00	-13.739.631.900,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp16.091.638.279,00 .

CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Lancar	16.853.850	12.849.600
Aset Tetap	7.332.284.767	6.496.886.576
Jumlah Aset	7.349.138.617	6.509.736.176
Kewajiban Jangka Pendek	7.723.742	8.077.781
Jumlah Kewajiban	7.723.742	8.077.781
Ekuitas	7.341.414.875	6.501.658.395
Jumlah Ekuitas	7.341.414.875	6.501.658.395
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.349.138.617	6.509.736.176

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.349.138.617 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp16.853.850 , Aset Tetap sebesar Rp7.332.284.767 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.341.414.875 .

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.853.850 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.849.600 . Hal ini berarti asset lancar naik sebesar Rp4.004.250 atau 31,16 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Persediaan	16.853.850	12.849.600
Jumlah Aset Lancar	16.853.850	12.849.600

5.2.2.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

5.2.2.1.2 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.853.850 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.849.600 . Hal ini berarti persediaan naik sebesar Rp4.004.250 atau 31,16 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	16.853.850	12.849.600
Jumlah	16.853.850	12.849.600

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Barang Pakai Habis	16.853.850	12.849.600
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0	1.614.100
Alat Tulis Kantor	0	1.017.000
Alat Listrik	7.808.850	10.050.000
Suvenir/Cendera Mata	7.650.000	0
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.395.000	168.500
Natura	1.395.000	168.500
JUMLAH PERSEDIAAN	16.853.850	12.849.600

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.332.284.767 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.496.886.576 . Hal ini berarti Aset Tetap naik sebesar Rp835.398.191 atau 12,86 persen. Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Tanah	5.138.640.000	5.138.640.000
Peralatan dan Mesin	9.327.823.834	7.973.956.834
Gedung dan Bangunan	5.354.291.538	5.354.291.538
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.202.000	67.202.000
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	-12.555.672.605	-12.037.203.796
Jumlah	7.332.284.767	6.496.886.576

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.138.640.000 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.138.640.000 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0 atau 0 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.327.823.834 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.973.956.834. Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp1.353.867.000 atau 16,98 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	112.689.000	112.689.000	6.592.000	1.700.000	117.581.000
1.1	Alat Besar Darat					
1.2	Alat Bantu	112.689.000	112.689.000	6.592.000	1.700.000	117.581.000
2	Alat Angkutan	2.309.552.285	2.309.552.285	31.810.000		2.341.362.285
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.309.552.285	2.309.552.285	31.810.000		2.341.362.285
2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur			8.600.000		8.600.000
3.1	Alat Bengkel Bermesin			8.600.000		8.600.000
3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin					
3.3	Alat Ukur					
4	Alat Pertanian			2.070.000		2.070.000
4.1	Alat Pengolahan			2.070.000		2.070.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.912.486.021	2.912.486.021	334.001.000	555.000	3.245.932.021
5.1	Alat Kantor.	1.194.976.630	1.194.976.630	131.100.000		1.326.076.630
5.2	Alat Rumah Tangga	1.337.784.481	1.337.784.481	184.341.000	555.000	1.521.570.481
5.3	Meubelair	379.724.910	379.724.910	18.560.000		398.284.910
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	355.717.532	355.717.532	227.149.000		582.866.532
6.1	Alat Studio.	130.525.260	130.525.260	70.100.000		200.625.260

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
6.2	Alat Komunikasi	106.392.272	106.392.272	157.049.000		263.441.272
6.3	Peralatan Pemancar	118.800.000	118.800.000			118.800.000
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan					
7.1	Alat Kedokteran.					
7.2	Alat Kesehatan Umum					
8	Alat Per-senjataan					
8.1	Persenjataan Non Senjata Api					
9	Komputer	2.261.511.996	2.261.511.996	745.900.000		3.007.411.996
9.2	Komputer Unit	1.188.129.588	1.188.129.588	433.600.000		1.621.729.588
9.2	Peralatan Komputer	1.073.382.408	1.073.382.408	312.300.000		1.385.682.408
10	Rambu - Rambu					
10.1	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat					
11	Peralatan Olah Raga	22.000.000	22.000.000			22.000.000
11.1	Peralatan Olah Raga.	22.000.000	22.000.000			22.000.000
Jumlah		7.973.956.834	7.973.956.834	1.353.867.000	2.255.000	9.327.823.834

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	7.973.956.834
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	1.324.312.000
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	31.810.000
Pengurangan:	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	2.255.000
Jumlah Per 31 Des 2024	9.327.823.834

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.353.867.000 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2024 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	1.324.312.000
Jumlah Belanja		1.324.312.000

- 2) Ditambah mutasi masuk dari OPD lain sebesar Rp31.810.000 yang menjadi Peralatan dan Mesin

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.255.000 .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.255.000 dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.354.291.538 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.354.291.538 . Hal ini berarti Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0 atau 0 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	5.354.291.538	5.354.291.538	0	0	5.354.291.538
Jumlah		5.354.291.538	5.354.291.538	0	0	5.354.291.538

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.202.000 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.202.000 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0 atau 0 persen dibandingkan tahun 2023.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.202.000	67.202.000	0	0	67.202.000
Jumlah		67.202.000	67.202.000	0	0	67.202.000

5.2.2.2.5 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024

sebesar -Rp12.555.672.605 sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar -Rp12.037.203.796. Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti turun sebesar -Rp518.468.809 atau 4,31 persen. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar -Rp12.555.672.605 dari Total Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp7.332.284.767 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.457.375.661	6.996.319.905
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.060.218.772	5.006.165.851
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.078.172	34.718.040
Jumlah	12.555.672.605	12.037.203.796

5.2.2.3 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781 . Hal ini berarti turun sebesar -Rp354.039 atau -4,38 persen.

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742 ,sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek turun sebesar -Rp354.039 atau -4,38 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang Belanja	7.723.742	8.077.781
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah	7.723.742	8.077.781

5.2.2.4.2 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781 . Hal ini berarti turun sebesar -Rp354.039 atau -4,38 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742 tersebut merupakan belanja listrik.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.341.414.875 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.501.658.395 . Hal ini berarti ekuitas naik sebesar Rp839.756.480 atau 12,92 persen.

5.2.3 CATATAN PENTING LAINNYA

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional tahun 2024 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban	15.283.691.799,00	14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-15.283.691.799,00	-14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit)-LO	-15.283.691.799,00	-14.066.125.540,00

Jumlah Beban tahun 2024 sebesar Rp15.283.691.799,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp9.401.713.862,00 , Beban Persediaan sebesar Rp455.289.469,00 , Beban Jasa sebesar Rp1.972.966.631,00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp239.174.190,00 , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp2.693.823.838,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp518.468.809,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp2.255.000,00 . Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00 terdiri dari Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00 diperoleh Beban sebesar Rp15.283.691.799,00 .

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban tahun 2024 adalah sebesar Rp15.283.691.799,00 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Pegawai	9.401.713.862,00	8.558.653.033,00
Beban Persediaan	455.289.469,00	473.132.707,00
Beban Jasa	1.972.966.631,00	1.782.894.069,00
Beban Pemeliharaan	239.174.190,00	232.953.478,00
Beban Perjalanan Dinas	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	518.468.809,00	623.769.135,00
Beban Lain-lain	2.255.000,00	0,00
Jumlah	15.283.691.799,00	14.066.125.540,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total Beban:

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp9.401.713.862,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp8.558.653.033,00 , maka realisasi beban pegawai meningkat sebesar Rp843.060.829,00 atau 9,85 persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.896.224,00	2.440.692.725,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.535.910.689,00	5.823.218.576,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	323.906.949,00	294.741.732,00
Jumlah	9.401.713.862,00	8.558.653.033,00

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2024 adalah sebesar Rp455.289.469,00 , Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp473.132.707,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar menurun sebesar -Rp17.843.238,00 atau -3,77 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	455.289.469,00	473.132.707,00
Jumlah	455.289.469,00	473.132.707,00

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.972.966.631,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp1.782.894.069,00 , berarti realisasi Beban Jasa meningkat sebesar Rp190.072.562,00 atau 10,66 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Jasa Kantor	1.890.346.815,00	1.704.883.889,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	47.209.816,00	50.527.680,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	21.830.000,00	6.682.500,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.580.000,00	20.800.000,00
Jumlah	1.972.966.631,00	1.782.894.069,00

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp239.174.190,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp232.953.478,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar Rp6.220.712,00 atau 2,67 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239.174.190,00	207.234.288,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	25.719.190,00
Jumlah	239.174.190,00	232.953.478,00

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 adalah sebesar Rp2.693.823.838,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp2.394.723.118,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar Rp299.100.720,00 atau 12,49 persen dibanding tahun 2023.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00
Jumlah	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00

5.3.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp518.468.809,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp623.769.135,00 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi menurun sebesar -Rp105.300.326,00 atau -16,88 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
I	Beban Penyusutan		
1.	Peralatan dan Mesin	461.055.756,00	566.355.795,00
2.	Gedung dan Bangunan	54.052.921,00	54.053.208,00
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.360.132,00	3.360.132,00
	Jumlah Beban Penyusutan	518.468.809,00	623.769.135,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
II	Beban Amortisasi		
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	518.468.809,00	623.769.135,00

5.3.2.1.7 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2024 adalah sebesar Rp2.255.000,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain meningkat sebesar Rp2.255.000,00 atau 0,00persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.255.000,00	0,00
Jumlah	2.255.000,00	0,00

5.3.2.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2023 adalah sebesar -Rp15.283.691.799,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban	15.283.691.799,00	14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-15.283.691.799,00	-14.066.125.540,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00, berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban	15.283.691.799,00	14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-15.283.691.799,00	-14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit)-LO	-15.283.691.799,00	-14.066.125.540,00

5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Ekuitas Awal	6.501.658.395,00	6.812.215.287,00
Surplus/(Defisit)-LO	-15.283.691.799	-14.066.125.540,00
RK PPKD	16.091.638.279,00	13.739.631.900,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	31.810.000	0,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0,00	0,00
Ekuitas	0,00	15.936.748,00
Ekuitas Akhir	7.341.414.875	6.501.658.395,00

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.341.414.875,00 terdiri dari:

- Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.501.658.395,00 .
- Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00.
- RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.091.638.279,00 .
- RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.810.000,00 .

5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 .
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 .
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.341.414.875,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.501.658.395,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2023 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 , berarti realisasi Ekuitas Awal menurun sebesar -Rp310.556.892,00 atau -4,56 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00. Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar -Rp14.066.125.540,00. Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 Surplus/(Defisit)-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurun sebesar -Rp1.217.566.259,00 atau 8,66 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD. RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.091.638.279,00 .

5.4.3.4 RA PPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD). Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2024 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp31.810.000,00 serta Saldo RA PPKD

(Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar Rp0,00

5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Koreksi Saldo Awal Kas		0,00
Kas Lainnya (BLUD)		0,00
Koreksi Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		0,00
Koreksi Setoran Kas di BP Tahun Lalu		0,00
Koreksi Piutang		0,00
Koreksi Penyisihan Piutang		0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00
Koreksi Nilai Persediaan		-960.000,00
Koreksi Investasi Permanen		0,00
Koreksi Kemitraan Pihak Ketiga		0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang Sewa		0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang TPA		0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang TGR		0,00
Koreksi KDP		0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka		0,00
Koreksi Pencatatan Penyertaan Modal Daerah		0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap		0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		19.318.180,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00
Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud		0,00
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain		0,00
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00
Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain		0,00
Koreksi Kewajiban		0,00
Koreksi Utang Belanja		-2.421.432,00
Koreksi Lain-Lain PAD Yang Sah		0,00
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0,00
Koreksi Beban Barang Dan Jasa		0,00
Koreksi Nilai Ekstrakomtabel		0,00

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Lain - Lain		0,00
Pembayaran Piutang Bagian Lancar TGR		0,00
Pembayaran Piutang Lain-Lain		0,00
Jumlah	0,00	15.936.748,00

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :

1.

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.341.414.875,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2024.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 , Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat sebesar Rp839.756.480,00 atau 12,92 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

5.4.4 CATATAN PENTING LAINNYA

-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BPKAD

6.1 DOMISILI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2, Kota Bandung.

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 142 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

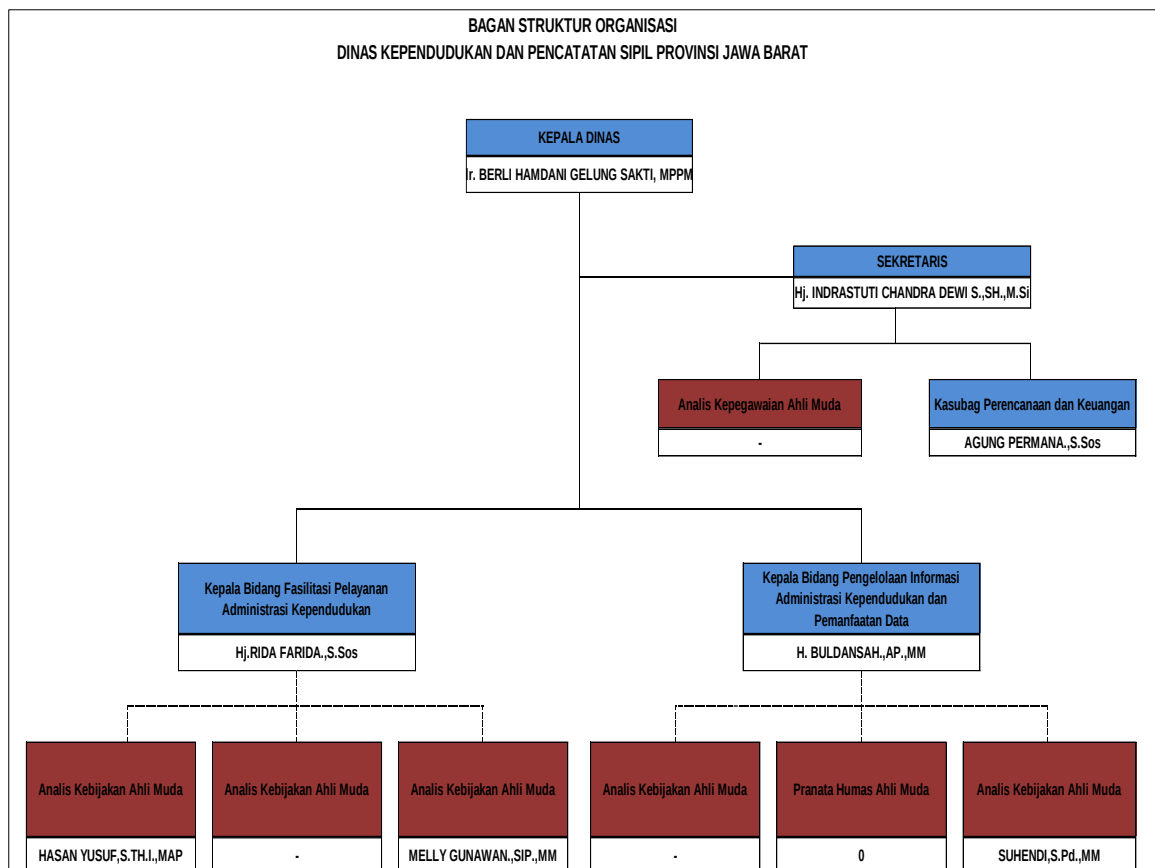
- a. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat



BAB VII**PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp7.349.138.617,00 Kewajiban sebesar Rp7.723.742,00 dan Ekuitas sebesar Rp7.341.414.875,00 ;
2. Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 menunjukkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp16.091.638.279,00 atau 95,87 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.784.375.039,00 . Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar -Rp16.091.638.279,00;
3. Pada Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 terdapat Beban sebesar Rp15.283.691.799,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar -Rp15.283.691.799,00;
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.501.658.395,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp7.341.414.875,00 .

Bandung, 26 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DECEMBER 2024 DAN 31 DECEMBER 2023
(di isi sesuai DPA)



DPA				Koreksi		Koreksi							
nama_level	akun	kode rekening	Nama Rekening	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Unaudited)	Debet	Kredit	Realisasi Setelah Koreksi Tahun 2024	Lebih / (Kurang)	%	Anggaran Perubahan 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)	
Objek	5	5	BELANJA DAERAH	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00	0,00	0,00	16.091.638.279,00	-692.736.760,00	95,87	14.951.609.670,00	13.739.631.900,00	
Face	5	5.1	BELANJA OPERASI	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00	0,00	0,00	14.767.326.279,00	-612.692.675,00	96,02	14.642.948.991,00	13.450.792.240,00	
Face	5	5.1.01	Belanja Pegawai	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00	0,00	0,00	9.401.713.862,00	-402.065.290,00	95,90	9.629.069.298,00	8.561.074.465,00	
Face	5	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.576.239.802,00	5.365.612.417,00	0,00	0,00	5.365.612.417,00	-210.627.385,00	96,22	5.013.879.693,00	4.889.717.775,00	
Face	5	5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face	5	5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face	5	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face	5	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face	5	5.2	BELANJA MODAL	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	0,00	0,00	1.324.312.000,00	-80.044.085,00	94,30	308.660.679,00	288.839.660,00	
Face	5	5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face	5	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00	0,00	0,00	1.324.312.000,00	-80.044.085,00	94,30	304.123.179,00	288.839.660,00	
Face	5	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face	5	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face	5	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537.500,00	0,00	
Face	5	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Face			SILPA	-16.784.375.039,00	-16.091.638.279,00	0,00	0,00	-16.091.638.279,00	692.736.760,00		-14.951.609.670,00	-13.739.631.900,00	
CONTROL FACE DAN RINCIAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nama_level	akun	kode rekening	Nama Rekening	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Unaudited)	Debet	Kredit	Realisasi Setelah Koreksi Tahun 2024	Lebih / (Kurang)	%	Anggaran Perubahan 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)	
Akun	5	5	BELANJA DAERAH	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00	0,00	0,00	16.091.638.279,00	-692.736.760,00	95,87	14.951.609.670,00	13.739.631.900,00	
Kelompok	5	5.1	BELANJA OPERASI	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00	0,00	0,00	14.767.326.279,00	-612.692.675,00	96,02	14.642.948.991,00	13.450.792.240,00	
Jenis	5	5.1.01	Belanja Pegawai	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00	0,00	0,00	9.401.713.862,00	-402.065.290,00	95,90	9.629.069.298,00	8.561.074.465,00	
Objek	5	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.788.391,00	2.541.896.224,00	0,00	0,00	2.541.896.224,00	-143.892.167,00	94,64	2.888.698.438,00	2.443.114.157,00	
Rincian Objek	5	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.925.701.400,00	1.823.426.300,00	0,00	0,00	1.823.426.300,00	-102.275.100,00	94,69	2.025.811.720,00	1.781.780.600,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.892.183.400,00	1.791.390.300,00	0,00	0,00	1.791.390.300,00	-100.793.100,00	94,67	2.025.811.720,00	1.781.780.600,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.518.000,00	32.036.000,00	0,00	0,00	32.036.000,00	-1.482.000,00	95,58			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	172.819.446,00	166.734.912,00	0,00	0,00	166.734.912,00	-6.084.534,00	96,48	217.180.320,00	159.370.606,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	168.762.448,00	162.762.448,00	0,00	0,00	162.762.448,00	-5.877.054,00	96,52	217.180.320,00	159.370.606,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.179.944,00	3.972.464,00	0,00	0,00	3.972.464,00	-207.480,00	95,04			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	106.840.000,00	105.980.000,00	0,00	0,00	105.980.000,00	-860.000,00	99,20	110.900.000,00	83.370.000,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	106.840.000,00	105.980.000,00	0,00	0,00	105.980.000,00	-860.000,00	99,20	110.900.000,00	83.370.000,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	66.120.000,00	62.540.000,00	0,00	0,00	62.540.000,00	-3.580.000,00	94,59	30.000.000,00	12.310.000,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	60.720.000,00	57.140.000,00	0,00	0,00	57.140.000,00	-3.580.000,00	94,10	30.000.000,00	12.310.000,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	100,00			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.630.000,00	60.735.000,00	0,00	0,00	60.735.000,00	-4.895.000,00	92,54	34.040.000,00	74.135.000,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.735.000,00	60.735.000,00	0,00	0,00	60.735.000,00	0,00	100,00			
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersas ASN	105.090.480,00	102.546.720,00	0,00	0,00	102.546.720,00	-2.543.760,00	97,58	131.755.400,00	104.864.160,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS	102.773.040,00	100.229.280,00	0,00	0,00	100.229.280,00	-2.543.760,00	97,52	131.755.400,00	104.864.160,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Bersas PPPK	2.317.440,00	2.317.440,00	0,00	0,00	2.317.440,00	0,00	100,00			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.539.549,00	5.150.324,00	0,00	0,00	5.150.324,00	-389.225,00	92,87	4.553.598,00	1.909.261,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.539.549,00	5.150.324,00	0,00	0,00	5.150.324,00	-389.225,00	92,87	4.553.598,00	1.909.261,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.421,00	24.578,00	0,00	0,00	24.578,00	-4.843,00	83,54	29.325,00		
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.891,00	24.191,00	0,00	0,00	24.191,00	-4.700,00	83,73	29.325,00		
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	530,00	387,00	0,00	0,00	387,00	-143,00	73,02			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	209.905.508,00	200.157.440,00	0,00	0,00	200.157.440,00	-9.748.068,00	95,36	253.400.000,00	210.563.432,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	206.905.508,00	197.763.656,00	0,00	0,00	197.763.656,00	-9.141.852,00	95,58	253.400.000,00	210.563.432,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.000.000,00	2.393.784,00	0,00	0,00	2.393.784,00	-606.216,00	79,79			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.046.245,00	3.450.238,00	0,00	0,00	3.450.238,00	-596.007,00	85,31	5.600.000,00	3.645.441,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.967.495,00	3.604.104,00	0,00	0,00	3.604.104,00	-363.391,00	90,84	5.600.000,00	3.645.441,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	78.750,00	46.134,00	0,00	0,00	46.134,00	-32.616,00	58,58			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.827.490,00	10.950.712,00	0,00	0,00	10.950.712,00	-876.778,00	92,59	15.400.000,00	10.936.332,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.603.480,00	10.812.216,00	0,00	0,00	10.812.216,00	-791.264,00	93,19	15.400.000,00	10.936.332,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	224.010,00	138.496,00	0,00	0,00	138.496,00	-86.604,00	61,51			
Rincian Objek	5	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.238.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.238.852,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.011.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.011.471,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	227.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.381,00	0,00	0,00	0,00	
Objek	5	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.771.961.269,00	6.535.910.689,00	0,00	0,00	6.535.910.689,00	-236.050.580,00	96,51	6.444.633.953,00	5.823.218.576,00	
Rincian Objek	5	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.660.250.121,00	6.432.656.689,00	0,00	0,00	6.432.656.689,00	-227.593.432,00	96,58	6.376.153.953,00	5.774.738.576,00	
Sub Rincian Objek	5	5.1.01.02.01											



Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

D877D1EA32



D877D1EA32



D877D1EA32



D877D1EA32



D877D1EA32



D877D1EA32

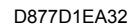
[illegible]

D877D1EA32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

Diselenggarakan secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KEPENDULUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARU

dr. BERSU HAMIDAH GOLONG SAKTI, SIPPH
Pencatat Lahir-Batas-Mati

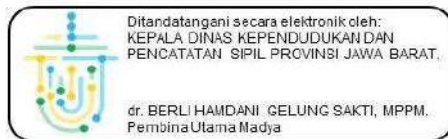
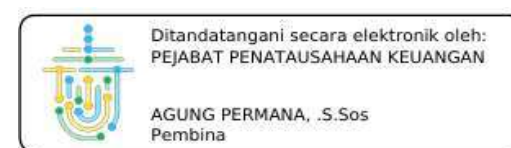


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 DECEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL 2024 (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31- Dec-2024 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31-Dec-2024 (Rp)	NILAI BUKU PER 31-Dec-2024 (Rp)
			BERTAMBAH	BERKURANG			
			(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)	7	8=(6-7)
1	TANAH	5.138.640.000,00	0,00	0,00	5.138.640.000,00	0,00	5.138.640.000,00
							0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	7.973.956.834,00	1.353.867.000,00	0,00	9.327.823.834,00	7.457.375.661,00	1.870.448.173,00
							0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.354.291.538,00	0,00	0,00	5.354.291.538,00	5.060.218.772,00	294.072.766,00
							0,00
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00	38.078.172,00	29.123.828,00
							0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	18.534.090.372,00	1.353.867.000,00	0,00	19.887.957.372,00	12.555.672.605,00	7.332.284.767,00

MENGETAHUI**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL****KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

D877D1EA32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
 Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
 tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 DECEMBER 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	KETERANGAN	Saldo Awal 2024	Realisasi Belanja Modal di LRA TA 2024	Realisasi Belanja Modal dari Jenis Aset Tetap yang lain	Realisasi Belanja Persediaan yang menjadi Belanja Modal TA.2024	Realisasi Belanja Modal dari Jenis Aset Tetap Bersangki TA.2024	Realisasi Belanja Modal yang menjadi Persediaan TA.2024	Realisasi Belanja Modal menjadi Jenis Aset Tetap yang sebenarnya TA.2024	Belanja Modal TA. 2024 yang tidak di Kapitalisasi (Tidak menjadi Aset Tetap)	Belanja Modal TA.2024 Yang Menjadi Aset Tetap	Mutasi Tambah								Mutasi Kurang								Saldo Akhir per 31-Dec-2024	Akumulasi Penyusutan s.d 31-Dec-2024	Nilai Buku Per 31-Dec-2024
											Penerimaan dari OPD Lain (Mutasi Masuk antar OPD)	Kapitalis asi dari Belanja Jasa	Koreksi Pencatat an	Reklasifi kasi Dari Jenis Aset Tetap Yang	Reklasifi kasi Dari Jenis Persedia an (Reklasifi kasi	Hibah/Pe ngakuan Penerima an Lainnya yang Sah	Utang Aset Tetap 2024	Jumlah	Penghap usan	Pernyera han Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar	Koreksi Pencatat an	Reklasifi kasi ke Jenis Aset Tetap Yang	Reklasifi kasi ke Persedia an (Reklasifi kasi	Hibah/Pe ngakuan Pengelu ran Lainnya yang Sah	Utang Aset Tetap 2023	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7-8)	10	11 = (9-10)	12	13	14	15	16	17	18 =(11+12+13+14+15+16+17)	19	20	21	22	23	24	19+20+21+22+23+24	25=(3+18-25)	27	28=(26-27)		
1	TANAH	5.138.640.000,00	0,00					0,00		0,00							0,00							0,00	5.138.640.000,00	0,00	5.138.640.000,00		
2	PERALATAN DAN MESIN	7.973.956.834,00	1.324.312.000,00					1.324.312.000,00	2.255.000,00	1.322.057.000,00	31.810.000,00						1.353.867.000,00							0,00	9.327.823.834,00	7.457.375.661,00	1.870.448.173,00		
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.354.291.538,00	0,00					0,00		0,00							0,00							0,00	5.354.291.538,00	5.060.218.772,00	294.072.766,00		
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	67.202.000,00	0,00					0,00		0,00							0,00							0,00	67.202.000,00	38.078.172,00	29.123.828,00		
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00					0,00		0,00							0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00						0,00		0,00							0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH ASET TETAP	18.534.090.372,00	1.324.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.312.000,00	2.255.000,00	1.322.057.000,00	31.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887.957.372,00	12.555.672.605,00	7.332.284.767,00		
	PERSEDIAAN							0,00		0,00							0,00							0,00	0,00		0,00		
	ASET LAINNYA - ASET TAK BERWUJUD							0,00		0,00							0,00							0,00	0,00		0,00		
	ASET LAINNYA - ASET LAIN - LAIN							0,00		0,00							0,00							0,00	0,00		0,00		
	JUMLAH	0,00	1.324.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	KETERANGAN UNTUK BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI																							0,00	0,00		0,00		
	BEBAN PERSEDIAAN							0,00		0,00														0,00	0,00		0,00		
	BEBAN JASA							0,00		0,00														0,00	0,00		0,00		
	BEBAN PEMELIHARAAN							0,00		0,00														0,00	0,00		0,00		
	BEBAN LAIN-LAIN							0,00	2.255.000,00	2.255.000,00														0,00	0,00		0,00		
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



D877D1EA32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

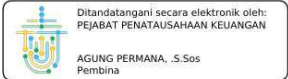
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAFTAR MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TEAP
31 DECEMBER 2024

NO	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2024 (Rp)	PENAMBAHAN						PENGURANGAN						SALDO AKHIR PER 31- Dec-2024 (Rp)
			KOREKSI	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya yang Sah	JUMLAH	KOREKSI	MUTASI KELUAR	REKLASIFIKASI	PENGHAPUSAN	Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya yang Sah	JUMLAH	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15 = 10+11+12+13+14	16 = 3+9-15
1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	6.996.319.905,00				461.055.756,00		461.055.756,00						0,00	7.457.375.661,00
2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	5.006.165.851,00				54.052.921,00		54.052.921,00						0,00	5.060.218.772,00
3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	34.718.040,00				3.360.132,00		3.360.132,00						0,00	38.078.172,00
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0,00				0,00		0,00						0,00	0,00
	JUMLAH	12.037.203.796,00	0,00	0,00	0,00	518.468.809,00	0,00	518.468.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555.672.605,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0,00				0,00		0,00						0,00	0,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	12.037.203.796,00	0,00	0,00	0,00	518.468.809,00	0,00	518.468.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555.672.605,00

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



D877D1EA32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN KETERANGAN LRA, LO, DAN NERACA
DINAS KEPENDULUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31 DESEMBER 2024

Kode Rekening LO	URAIAN LRA	Belanja LRA TA 2024	BERTAMBAH										Jumlah BERTAMBAH	BERKURANG										Jumlah BERKURANG	BERAN TAHUN 2024	BERAN TAHUN 2023
			NILAI BERAN DIHAYAR DIMUKA T-1 yang menjadi Belan Tahun berjalan	REKLASIFIKASI KELUAR BERAN BARANG DAN JASA BLUD	REKLASIFIKASI MASUK BERAN BARANG DAN JASA BOS	REKLASIFIKASI MASUK ANTAR BERAN	HIRAH KELUAR	BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI	Administrasi Jasa Baka RS	SALDO KEWAJIBAN TAHUN LAPORAN	BERAN PENURUNAN NILAI INVESTASI	13 = 6 + 5 + 8 + 7 + 4 + 9 + 10 + 11 + 12		SALDO KEWAJIBAN T- 1	NEUTRAL BERAN DIHAYAR DIMUKA Tahun Berjalan, yang menjadi Belan di sucursal Belan di	BELANJA YANG MENJADI PERSIDHAAN	KAPITALISASI MENJADI ANET	PUTANG BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA	REKLASIFIKASI KELUAR ANTAR BERAN	REKLASIFIKASI KELUAR BERAN BARANG DAN JASA BLUD	REKLASIFIKASI BERAN MENJADI PUTANG	22 = 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	BERAN PEGAWAI																									
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.896.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.896.224,00	2.440.692.725,00			
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.535.910.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.910.689,00	5.823.218.576,00			
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Perhitungan Objektif Lainnya ASN	323.906.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.906.949,00	294.741.752,00			
	JUMLAH BERAN PEGAWAI	9.401.713.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401.713.862,00	8.558.653.033,00			
	BERAN JASA																									
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.890.700.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723.742,00	0,00	7.723.742,00	8.077.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077.781,00	1.890.346.815,00	1.704.883.889,00		
8.1.02.02.02	Beban Jasa Jaminan/Asuransi	47.209.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.209.816,00	50.527.680,00			
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	21.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830.000,00	6.682.500,00			
8.1.02.02.13	Beban Keras/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580.000,00	20.800.000,00			
	JUMLAH BERAN JASA	1.972.328.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723.742,00	0,00	7.723.742,00	8.077.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077.781,00	1.972.966.631,00	1.782.894.069,00		
	BERAN PEMELIHARAAN																									
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239.174.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.174.190,00	207.234.288,00			
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719.190,00			
	JUMLAH BERAN PEMELIHARAAN	239.174.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.174.190,00	232.953.478,00			
	BERAN PERJALANAN DINAS																									
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.693.823.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00			
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	JUMLAH BERAN PERJALANAN DINAS	2.693.823.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.823.838,00	2.394.723.118,00			
	BERAN LAIN - LAIN																									
8.1.02.01.04	Beban Asst Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00			
5.3.01.01	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	JUMLAH BERAN LAIN-LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00			
	TOTAL	14.308.832.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	7.723.742,00	0,00	9.978.742,00	8.077.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077.781,00	14.309.933.521,00	12.969.223.698,00		

KEPALA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KEPALA SUB BAGAN TATA USAHA

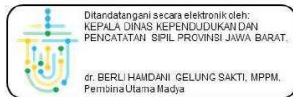


D877D1EA32

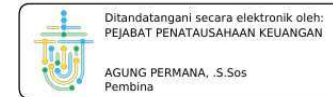
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

Level Akun	Koding LRA	Uraian Belanja - LRA	Koding Persediaan Neraca	Uraian Persediaan Neraca	Koding	Beban - LO	Saldo Akhir Persediaan Tahun Berjalan	Pemakaian Persediaan Tahun Berjalan	Persediaan (Usang/Rusak) Tahun Berjalan	Penyerahan Kepada Pihak Ketiga	Beban Persediaan Tahun Berjalan	Beban Persediaan T-1
						Total Beban Persediaan	16.853.850,00	455.289.469,00	0,00	0,00	455.289.469,00	473.132.707,00
objek	5.1.02.01	Belanja Barang	1.1.12.01	BARANG PAKAI	8.1.02.01	Beban Barang	16.853.850,00	455.289.469,00	0,00	0,00	455.289.469,00	473.132.707,00
rincian_objek	5.1.02.01.01	Belanja Barang	1.1.12.01.01	BAHAN	8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	16.853.850,00	455.289.469,00	0,00	0,00	455.289.469,00	473.132.707,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Bahan	1.1.12.01.01.01	Bahan Bangun	8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	10.765.000,00	0,00	0,00	10.765.000,00	960.000,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Bahan	1.1.12.01.01.01	Bahan Bakar	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	4.327.500,00	0,00	0,00	4.327.500,00	
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Bahan	1.1.12.01.01.01	Isi Tabung Pemadam	8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Bahan	1.1.12.01.01.01	Bahan Lainnya	8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	10.950.200,00	0,00	0,00	10.950.200,00	900.000,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Suku Cadang	1.1.12.01.01.02	Suku Cadang	8.1.02.01.01.0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433.000,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Alat Tulis Kantor	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	40.093.662,00	0,00	0,00	40.093.662,00	71.220.708,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Kertas dan Cover	8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Bahan Cetak	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	132.251.350,00	0,00	0,00	132.251.350,00	166.003.069,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Benda Pos	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.800.000,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Bahan Komputer	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00	38.403.780,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Perabot Kantor	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	46.568.152,00	0,00	0,00	46.568.152,00	33.494.294,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Alat Listrik	8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.808.850,00	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	3.461.695,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Perlengkapan	8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	9.470.000,00	0,00	0,00	9.470.000,00	
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Perlengkapan Pendukung	8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung	0,00	4.504.800,00	0,00	0,00	4.504.800,00	2.494.940,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Suvenir/Cendera Mata	8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.650.000,00	12.096.700,00	0,00	0,00	12.096.700,00	
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Alat/Bahan	1.1.12.01.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan	8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	0,00	10.382.849,00	0,00	0,00	10.382.849,00	
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Natur	1.1.12.01.01.07	Natura	8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.395.000,00	31.274.161,00	0,00	0,00	31.274.161,00	
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Makanan dan Minuman	1.1.12.01.01.07	Natura	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	89.860.095,00	0,00	0,00	89.860.095,00	126.788.469,00
sub_rincian_objek	5.1.02.01.01.01	Belanja Makanan dan Minuman	1.1.12.01.01.07	Natura	8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172.752,00
sub_rincian_objek	5.1.02.05.01.01	Belanja Imbal Jasa	5.1.02.05.01.01	Belanja Imbal Jasa	8.1.02.05.01.0013	Beban Imbal Jasa Penjaminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KEPALA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan



D877D1EA32

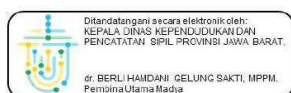
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

PROVINSI JAWA BARAT
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI SERTA BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
31 DECEMBER 2024

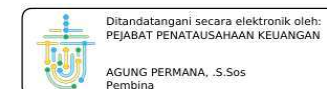
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URAIAN	BEBAN TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2023
1	2	3
A. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
A.1 BEBAN PENYUSUTAN		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	461.055.756	566.355.795
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.052.921	54.053.208
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.360.132	3.360.132
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0	0
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0	0
Beban Penyusutan Properti Investasi	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	518.468.809	623.769.135
A.2. BEBAN AMORTISASI		
Beban Amortisasi	0	0
JUMLAH BEBAN AMORTISASI	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	518.468.809	623.769.135

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>



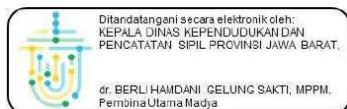
D877D1EA32

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL NERACA DAN LRA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PER 31 December 2024

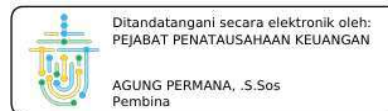
NO	URAIAN	LRA	NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)
1	TANAH	-	-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	1.324.312.000,00	1.322.057.000,00	2.255.000,00	ekstrakomptable
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	-	
7	ASET LAINNYA	-	-	-	
JUMLAH		1.324.312.000,00	1.322.057.000,00	2.255.000,00	

Mengetahui,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan



D877D1EA32

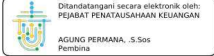
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>

NO	Kode Rek UTANG BELANJA	NAMA REKENING UTANG BELANJA	URAIAN	SALDO AWAL (KEWAJIBAN PER 31 December 2023)		Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	SALDO AWAL 2024 SETELAH KOREKSI	MUTASI KURANG (KEWAJIBAN PER 31 Dec 2023 YANG DIBAYAR DI TA. 2024)		MUTASI TAMBAH (KEWAJIBAN TAHUN 2024 YANG BELUM DIBAYAR PER 31 Dec 2024)		KEWAJIBAN PER 31 Dec 2024	
				NO DOKUMEN	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NO SP2D/SPJ	NILAI (Rp)	NO DOKUMEN	NILAI (Rp)		
1		2	3		4	5	6	7=(4-5+6)	8	9	10	11	12=(7-9+11)	
	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tapihan Telepon	-	3	-	8.077.781,00	-	-	8.077.781,00	-	8.077.781,00	-	7.723.742,00	7.723.742,00
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tapihan Air						-					-	-
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tapihan Listrik				8.077.781,00		8.077.781,00		8.077.781,00		7.723.742	7.723.742,00	7.723.742,00
		JUMLAH				8.077.781,00	-	-	8.077.781,00	-	8.077.781,00	-	7.723.742,00	7.723.742,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan



D877D1EA32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D877D1EA32>